

**PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
TERHADAP KINERJA KEUANGAN BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

*The Influence Of Performance Based Budget Implementation On Financial
Performance Of The Mentawai Regency*

Lumongga Roy Nathalie Sirait; Delvianti; Yuli Ardiany

Fakultas Ekonomi Universitas Ekasakti Padang

E-mail: <mailto:loemongga70@gmail.com>

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan lembaga keuangan daerah kabupaten Kepulauan Mentawai. Pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi sederhana. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden penelitian melalui penyebaran kuesioner. Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan secara parsial menunjukkan hasil sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan nilai t hitung $X = 4,025$ dan t tabel sebesar 2,006 sehingga t hitung $>$ t tabel ($4,025 > 2,006$)

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai lebih meningkatkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, karena peningkatan penerapan anggaran berbasis kinerja dapat dijadikan sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah. Dinas Keuangan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mencapai efektivitas pengendalian, serta terus ditingkatkan. kualitas pelayanan dan anggaran yang direncanakan lebih ditujukan kepada masyarakat luas agar masyarakat merasa lebih puas dengan pelayanan yang diberikan

Kata Kunci : Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, Kinerja Keuangan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Abstract

This study discusses the effect of the effect of the implementation of performance-based budgets on the financial performance of the regional financial institutions of the Mentawai Islands district. Data processing in this study is to use a simple regression model. Sources of data in this study are primary data obtained directly from research respondents through distributed questionnaires. The sample taken in this study using a total sampling technique.

The results of the analysis of this study indicate that the performance-based budget has a positive effect on financial performance partially showing the results of 0.000 less than 0.05. While the value of t count $X = 4.025$ and t table is 2.006 so that t count $>$ t table ($4.025 > 2.006$)

Based on the results of this study, it is hoped that the Regional Finance Agency of the Mentawai Islands Regency should further improve the implementation of performance-based budgeting, because the increased application of performance-based budgeting can be used as a tool for the Regional Finance Agency of Mentawai Islands Regency to achieve control effectiveness, as well as continue to improve. the quality of service and the planned budget is more aimed at the wider community so that people feel more satisfied with the services provided

Keywords: *Implementation of Performance-Based Budgeting, Financial Performance, Regional Financial Agency for Mentawai Islands Regency*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang mengatur mengenai perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dengan sistem pemerintahan sudah mulai efektif. Undang-undang tersebut merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan menggambarkan serta memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Pertimbangan mendasar terselenggaranya otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam negeri yang mengindikasikan bahwa semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap Negara, termaksud daya saing pemerintah daerahnya. Daya saing pemerintah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Selanjutnya peningkatan kemandirian pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah (Halim 2014:2).

Tujuan program otonomi daerah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara responsif terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Hal ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri, (Bastian 2016:76). Adapun undang-undang tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. tetapi yang lebih penting adalah efisiensi dan efektifitas sumber daya keuangan.

Oleh karena itulah diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri (Bastian 2016:6). Hal tersebut sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonomi yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu terletak pada strategi sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah (Soedjono 2015:77).

Selain itu sejalan dengan yang diamanatkan dalam undang-undang tentang perimbangan keuangan Negara akan pula diterapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik agar penggunaan anggaran tersebut bisa dinilai kemanfaatan dan kegunaannya oleh masyarakat (Abimanyu 2015:67). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja.

Anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Adapun kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik (Mariana 2015:87). Melalui Permendagri No. 21 Tahun 2011 Implementasi paradigma baru yang berorientasi pada prestasi kinerja dapat diterapkan dalam penyusunan APBD, baik dalam system akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah. Anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang (Indra Bastian, 2016:35).

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun 2018). Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja. Anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Adapun kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik (Mariana 2015:79).

Penyusunan APBD berbasis kinerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Dalam penyelenggaraannya pemerintah daerah dituntut lebih responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kepentingan masyarakat (Mardiasmo (2016:56)). Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia sudah dicanangkan melalui pemberlakuan dinyatakan dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Rencana Kerja.

Sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metoda tradisional atau item line budget. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggungjawabannya tidak diperiksa dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2017) tentang pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat didapatkan hasil Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan V. Artinya semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja pada BPJ Wilayah Pelayanan V, maka akan meningkatkan kinerja keuangan di BPJ Wilayah Pelayanan V.

Berdasarkan fenomena yang ada pada anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam praktik, masih banyak dijumpai kelemahan sejak perencanaan kinerja, proses penyusunan dan pembahasan anggaran sampai dengan penguangannya dalam format-format dokumen anggaran rencana kerja anggaran dan rencana pendapatan dan belanja daerah. Meski pemerintah telah memiliki rencana kerja anggaran, namun hanya merupakan kompilasi berbagai usulan program kementerian/lembaga dengan indikator yang juga beragam yang dapat mengalami kesulitan untuk merumuskan indikator kinerja. Tidak dapat dijumpai dalam Rencana Kegiatan Pemerintah dengan jelas apa kinerja yang spesifik dan terukur yang akan dihasilkan dari program-program pemerintah, siapa saja instansi yang bertanggung jawab dan bagaimana kontribusi masing-masing instansi untuk mewujudkan kinerja.

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah salah satunya dengan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang merupakan salah satu badan yang menerapkan anggaran berbasis kinerja. Namun, berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam perkembangannya Kabupaten Kepulauan Mentawai

melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah dikarenakan adanya anggaran Dana Alokasi Khusus yang tidak sesuai dengan penganggaran (APBD Mentawai, 2019). Pada saat penyusunan anggaran seringkali jadwal asistensi yang terlalu singkat sehingga pengecekan ulang acapkali terlewatkan sehingga dapat terjadi kesalahan penempatan rekening belanja yang berakibat beberapa kegiatan yang telah disahkan penganggarnya tidak dapat dilaksanakan karena anggaran yang disusun tidak sesuai dengan kebutuhan kegiatan tersebut.

Di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ketika pelaksanaan asistensi anggaran kadangkala pihak-pihak yang berkompeten dalam penyusunan anggaran OPD tersebut tidak hadir, sehingga ketika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membutuhkan informasi yang berkaitan dengan anggaran kegiatan tersebut TAPD tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Seringkali juga indikator kinerja kegiatan yang dibuat oleh OPD pada rencana kegiatan tidak terukur dan tidak sesuai dengan sasaran kegiatan tersebut. Hal-hal tersebut diatas mengakibatkan harus dilakukannya Perubahan Peraturan Kepala Daerah agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai”**
Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan serta terkait dengan fenomena mengenai permasalahan keseimbangan anggaran, penulis mengidentifikasi masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan pembahasan adalah apakah anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran

Anggaran berasal dari kata *budget* (Inggris), sebelumnya dari kata *bougette* (Perancis) yang berarti sebuah tas kecil. Menurut Indra Bastian (2016:191), berdasarkan *The National Committee on Governmental Accounting* (NCGA) yang saat ini telah menjadi *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) definisi anggaran (*budget*) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu

Anggaran Berbasis Kinerja

Halim, (2014:65) mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja.

Indikator Anggaran Berbasis Kinerja

Adapun indikator dalam mengukur Anggaran Berbasis Kinerja yaitu:

1. Pengukuran Kinerja
2. Penghargaan dan Hukuman
3. Kontrak Kinerja
4. Kontrol Eksternal dan Internal
5. Pertanggungjawaban Manajemen

Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan adalah penentuan secara priodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kreteria yang telah ditetapkan sebelumnya Mardiasmo (2015:28)

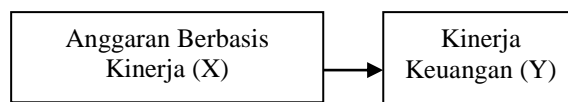
Indikator Kinerja Keuangan

Menurut (Halim, 2017:230) mendefinisikan Indikator Kinerja Keuangan sebagai berikut:

1. Masukan (*Inputs*)
2. Proses (*Prosess*)
3. Keluaran (*Output*)
4. Hasil (*Outcome*)
5. Manfaat (*Benefit*)
6. Dampak (*Impact*)

Kerangka Konseptual

Sesuai dengan telaah literatur yang telah dikemukakan di atas, dapat dikembangkan suatu kerangka teoritis yaitu sebagai berikut:



Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori-teori dan tinjauan penelitian terdahulu maka dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Berpengaruh Positif dan signifikan Terhadap Kinerja Keuangan

Hubungan penerapan anggaran berbasis kinerja adalah sistem penyusunan dan pengolahan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kerja atau kinerja". Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti berorientasi pada kepentingan publik. instansi menjalankan anggaran berbasis kinerja sebagai alat yang efisien dalam hubungannya dengan kinerja keuangan. Apabila anggaran berbasis kinerja dilaksanakan dengan baik, maka kinerja keuangan pun akan baik pula. Dengan kata lain ditemukan bukti anggaran berbasis kinerja sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Hasil penelitian ini pun sejalan atau sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2018), dimana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Kinerja keuangan

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada suatu lembaga Badan Keuangan Daerah berlokasi di Jl. Raya Tuapejat KM 4 Sipora Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang sebaik-baiknya dengan asumsi agar sasaran dalam penulisan dapat tercapai, maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu peninjauan langsung pada perusahaan yang diteliti untuk memperoleh data primer. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah wawancara, yaitu melakukan penelitian langsung untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terlibat langsung.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, serta literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti yang berguna sebagai pedoman teoritis pada waktu melakukan penelitian lapangan dan untuk mendukung serta menganalisa data.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode angket atau kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti. Untuk memperoleh data, angket disebarkan kepada responden (orang-orang yang menjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian), terutama pada penelitian survei. Dalam hal ini penulis membuat pertanyaan-pertanyaan tertulis kemudian dijawab oleh responden/sampling. Dan bentuk angketnya adalah angket tertutup, yaitu angket yang soal-soalnya menggunakan teknik pilihan skala liker, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang dikehendaki (Sugiono, 2017:163)

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian metode yang menggunakan populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah disampaikan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden penelitian melalui kuesioner yang disebarkan. Kuisisioner ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada responden. Kuesioner disebarkan dan sekaligus dikumpulkan langsung oleh peneliti. Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berasal dari pegawai pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan kelompok, peristiwa atau suatu ketertarikan yang ingin diselidiki oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah PNS yang berkaitan langsung dengan penganggaran, pencatatan/pelaporan keuangan, penerimaan dan pengeluaran kas pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Populasi Penelitian

| No | Jabatan | Jumlah |
|----|-------------------------------------|--------|
| 1 | Kepala Badan Keuangan Daerah | 1 |
| 2 | Kabid Anggaran | 1 |
| 3 | Kasubid Perencanaan Anggaran Daerah | 1 |
| 4 | Kasubid Pembinaan Anggaran | 1 |
| 5 | Pegawai Badan Keuangan Daerah | 50 |
| | Total Populasi | 54 |

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi atau sebagian populasi yang menjadi subyek penelitian yang dapat mewakili populasi penelitian (Arikunto, 2013). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan metode *Total sampling*. Menurut Arikunto (2016:120) total sampling adalah pengambilan sampel yang sama dengan jumlah populasi yang ada. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Keuangan Daerah dan pegawai yang berkaitan langsung dengan penganggaran, pencatatan/pelaporan keuangan, penerimaan dan pengeluaran kas pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, berikut adalah sampel penelitian:

Tabel 2
Sampel Penelitian

| No | Jabatan | Jumlah |
|----|-------------------------------------|--------|
| 1 | Kepala Badan Keuangan Daerah | 1 |
| 2 | Kabid Anggaran | 1 |
| 3 | Kasubid Perencanaan Anggaran Daerah | 1 |
| 4 | Kasubid Pembinaan Anggaran | 1 |
| 5 | Pegawai Badan Keuangan Daerah | 50 |
| | Total Sampel | 54 |

Metode Analisis Data

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan berbagai pengujian statistik. Analisis data tidak hanya digunakan untuk menguji hipotesis tetapi juga untuk pengujian statistik lainnya.

Metode Penelitian yang menggambarkan suatu fenomena sosial atau pemahaman dari suatu realita dan merincikan menjadi variabel yang saling berkaitan dengan tujuan memperoleh pemahaman dan makna dari masalah yang akan diteliti. Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya persentase jawaban responden terhadap kedua variabel yang dianalisa.

Menurut Sugiyono (2015:93) bahwa untuk mengukur pendapat atau persepsi seseorang atau kelompok sosial dalam suatu penelitian menggunakan skala pengukuran Likert. Skala Likert akan merubah variabel-variabel menjadi indikator variabel yang pada akhirnya dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item

instrumen berupa pernyataan atau pertanyaan. Instrumen penelitian ini dibuat dalam bentuk ceklis dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila jawaban responden Sangat Setuju (SS) diberi nilai = 5
2. Apabila jawaban responden Setuju (S) diberi nilai = 4
3. Apabila jawaban responden Kurang Setuju (KS) diberi nilai = 3
4. Apabila jawaban responden Tidak Setuju (TS) diberi nilai = 2
5. Apabila jawaban responden Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai = 1

Menurut Arikunto (2016:65) Analisis ini bermaksud untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel penelitian. Dengan cara menyajikan data ke dalam tabel distribusi frekuensi, menghitung nilai rata-rata, skor total, dan tingkat pencapaian responden (TCR) serta menginterpretasikannya. Analisis ini tidak menghubungkan-hubungkan satu variabel dengan variabel lainnya dan tidak membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya. Untuk mencari tingkat pencapaian jawaban responden digunakan rumus berikut:

$$TCR = \frac{\text{rata-rata skor}}{5} \times 100$$

Dimana: TCR = tingkat pcpaian jawaban responden menyatakan bahwa kriteria nilai tingkat capaian responden (TCR) dapat diklasifikasikan sebagai berikut

Tabel 3.3 : Tingkat Capaian Responden

| No | Tingkat Capaian Responden (TCR) | Kriteria |
|----|---------------------------------|-------------|
| 1 | 90 % - < 100 % | Sangat Baik |
| 2 | 80 % - < 90 % | Baik |
| 3 | 65 % - < 80 % | Cukup Baik |
| 4 | 55 % - < 65 % | Kurang Baik |
| 5 | 0% - < 55 % | Tidak Baik |

Uji Intrumen

Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa angket atau kuisisioner yang dibuat sendiri oleh peneliti. Sugiyono (2014: 92) menyatakan bahwa "Instrumen penelitian adalah suatu alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati". Dengan demikian, penggunaan instrumen penelitian yaitu untuk mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah, fenomena alam maupun sosial.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang akurat yaitu dengan menggunakan skala Likert. Sugiyono (2014:134) menyatakan bahwa "Skala Likert digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial.

1. Uji Validitas

Pengujian terhadap validitas dilakukan untuk meyakinkan bahwa pengukuran yang digunakan benar-benar mengukur konsep yang akan diukur (Sekaran, 2016:41). Validitas yang akan diuji dalam penelitian ini adalah *construct validity*. *Construct validity* ditunjukkan oleh koefisien korelasi yang diperoleh pada masing-masing item pertanyaan (skor butir) dengan skor totalnya. Koefisien korelasi antar item (skor butir) dan skor totalnya merupakan indeks validitas item (skor butir), dengan koefisien yang relatif tinggi menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dapat dikatakan valid. Uji validitas dilakukan dengan metode *Pearson's Product Moment*.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas pengukuran menunjukkan tingkat kebebasan pengukuran dari bias atau kesalahan (Sekaran, 2014:41). Reliabilitas pengukuran menunjukkan stabilitas dan konsistensi instrumen pengukuran dalam mengukur konsep. Pengujian reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *interitem consistency reliability* (reliabilitas konsistensi antar item). Tes ini dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban responden terhadap semua item pertanyaan dalam suatu pengukuran (Sekaran, 2014). Cara yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah dengan menghitung *Cronbach's coefficient alpha*.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi tersebut benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif maka model dari uji asumsi klasik tersebut harus memenuhi asumsi klasik regresi (Ghozali, 2011:161).

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013: 160). Seperti diketahui bahwa Uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik (Ghozali, 2013: 160).

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka menunjukkan pola distribusi normal yang mengindikasikan bahwa regresi memenuhi asumsi normal. Uji Statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji *statistic non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S)* Artinya jika nilai *Kolmogorov-Smirnov* > 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013:44). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar).

Analisis Regresi Sederhana

Metode regresi dilakukan terhadap model yang diajukan oleh peneliti menggunakan program SPSS 24 untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan rumusan masalah dan

kerangka konseptual yang telah diuraikan sebelumnya, maka model penelitian yang dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + bx + e$$

Keterangan:

- y = Kinerja Keuangan
- x = Anggaran Berbasis Kinerja
- a = Konstanta
- b = Koefisien regresi
- e = Standar *error*

Regresi linier pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independent yang diuji secara bersama-sama (simultan) dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Hipotesis

Uji t

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2016).

Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini menurut Ghozali (2016) adalah jika *p value* < 0,05 maka Hipotesis diterima. Sebaliknya, jika *p value* \geq 0,05 maka Hipotesis ditolak (Ghozali, 2016:44).

1. Menentukan Tingkat Signifikan

Tingkat signifikan pada penelitian ini adalah 5% dimana dapat di ketahui dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. Jika angka signifikan (sig) < 0,05 maka kedua variabel mempunyai hubungan yang signifikan.
- b. Jika angka signifikan (sig) > 0,05 maka kedua variabel tidak mempunyai hubungan yang signifikan.

2. Pengambilan Keputusan

- a. Jika T hitung < T tabel, maka H0 diterima H1 ditolak
- b. Jika T hitung > T tabel maka H0 ditolak H1 diterima

Uji Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi-variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2015:33).

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

a. Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X)

Berikut ini ringkasan hasil pengujian validitas untuk item atau butir pertanyaan variabel Anggaran Berbasis Kinerja dengan pendekatan koefisien korelasi untuk nilai $n=54$ $r_{table}= 0.266$ melalui *korelasi pearson* yang disajikan pada tabel 3 :

Tabel 3
Anggaran Berbasis Kinerja (X)

| No Item | Batas Valid | Koefisiensi Korelasi | Keterangan |
|---------|-------------|----------------------|------------|
| 1 | 0,266 | 0.575 | Valid |
| 2 | 0,266 | 0.565 | Valid |
| 3 | 0,266 | 0.540 | Valid |
| 4 | 0,266 | 0.676 | Valid |
| 5 | 0,266 | 0.787 | Valid |
| 6 | 0,266 | 0.725 | Valid |
| 7 | 0,266 | 0.698 | Valid |
| 8 | 0,266 | 0.619 | Valid |
| 9 | 0,266 | 0.647 | Valid |
| 10 | 0,266 | 0.634 | Valid |
| 11 | 0,266 | 0.866 | Valid |
| 12 | 0,266 | 0.701 | Valid |
| 13 | 0,266 | 0.520 | Valid |
| 14 | 0,266 | 0.839 | Valid |
| 15 | 0,266 | 0.705 | Valid |
| 16 | 0,266 | 0.480 | Valid |
| 17 | 0,266 | 0.864 | Valid |
| 18 | 0,266 | 0.746 | Valid |
| 19 | 0,266 | 0.533 | Valid |
| 20 | 0,266 | 0.713 | Valid |
| 21 | 0,266 | 0.313 | Valid |
| 22 | 0,266 | 0.559 | Valid |
| 23 | 0,266 | 0.647 | Valid |
| 24 | 0,266 | 0.779 | Valid |
| 25 | 0,266 | 0.567 | Valid |

Sumber : Hasil pengolahan data, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan semua item anggaran berbasis kinerja 1 sampai item anggaran berbasis kinerja 25 adalah valid dimana nilai *correlated item total correlation* $> 0,266$.

b. Pengujian Validitas Variabel Kinerja Keuangan (Y)

Berikut ini ringkasan hasil pengujian validitas untuk item atau butir pertanyaan variabel Kinerja Keuangan dengan pendekatan koefisien korelasi untuk nilai $n=54$ $r_{table}= 0.266$ melalui *korelasi pearson* yang disajikan pada tabel 4

Tabel 4
Kinerja Keuangan (Y)

| No Item | Batas Valid | Koefisiensi Korelasi | Keterangan |
|---------|-------------|----------------------|------------|
| 1 | 0,266 | 0.484 | Valid |
| 2 | 0,266 | 0.808 | Valid |
| 3 | 0,266 | 0.795 | Valid |
| 4 | 0,266 | 0.356 | Valid |
| 5 | 0,266 | 0.748 | Valid |
| 6 | 0,266 | 0.796 | Valid |
| 7 | 0,266 | 0.577 | Valid |

| No Item | Batas Valid | Koefisiensi Korelasi | Keterangan |
|---------|-------------|----------------------|------------|
| 8 | 0,266 | 0.793 | Valid |
| 9 | 0,266 | 0.635 | Valid |
| 10 | 0,266 | 0.541 | Valid |
| 11 | 0,266 | 0.580 | Valid |
| 12 | 0,266 | 0.704 | Valid |
| 13 | 0,266 | 0.742 | Valid |
| 14 | 0,266 | 0.671 | Valid |
| 15 | 0,266 | 0.763 | Valid |
| 16 | 0,266 | 0.791 | Valid |
| 17 | 0,266 | 0.781 | Valid |
| 18 | 0,266 | 0.760 | Valid |
| 19 | 0,266 | 0.809 | Valid |
| 20 | 0,266 | 0.632 | Valid |
| 21 | 0,266 | 0.353 | Valid |
| 22 | 0,266 | 0.431 | Valid |
| 23 | 0,266 | 0.404 | Valid |
| 24 | 0,266 | 0.774 | Valid |
| 25 | 0,266 | 0.578 | Valid |
| 26 | 0,266 | 0.368 | Valid |
| 27 | 0,266 | 0.638 | Valid |
| 28 | 0,266 | 0.510 | Valid |
| 29 | 0,266 | 0.674 | Valid |
| 30 | 0,266 | 0.564 | Valid |

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan semua item Kinerja Keuangan 1 sampai item 30 adalah valid dimana nilai *correlated item total correlation* > 0,266.

c. **Reabilitas**

Tabel 5 Hasil Uji Reabilitas

| No | Variabel | Cronbachs Apha | Keterangan |
|----|---------------------------|----------------|--------------|
| 1 | Anggaran Berbasis Kinerja | 0,947 | Reliabilitas |
| 2 | Kinerja Keuangan | 0,946 | Reliabilitas |

Berdasarkan tabel 4.6 dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan realibel. Semua variabel realibel disebabkan karena hasil *correlated total item corelation* besar dari 0,266 (untuk n=54 r table = 0,266).

d. **Uji Normalitas**

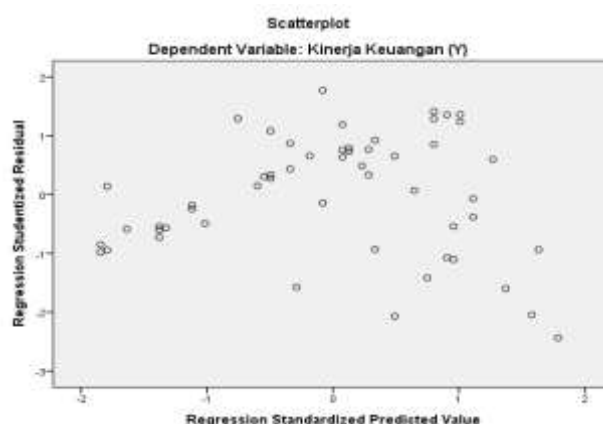
Tabel 6 Hasil Uji Normalitas

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|--|-------------------------|
| N | | 54 |
| Normal Parameters ^{a,b} | | 0,0000000 |
| | | 16.18529535 |
| Most Extreme Differences | | .092 |
| | | .099 |
| | | .062 |
| | | .099 |
| | | -.070 |
| Test Statistic | | .092 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .200 ^{c,d} |

Dari Tabel 6 diketahui bahwa nilai Asym.Sig (2-tailed) untuk unstandardized residual sebesar 0,200, dapat disimpulkan bahwa nilai Asym.Sig (2-tailed) dalam penelitian ini nilainya lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan pada penelitian yaitu ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian berdistribusi normal, dengan demikian analisis regresi linear sederhana dapat dilaksanakan karena data telah berdistribusi normal.

e. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1



Berdasarkan gambar 4.1 ditemukan penyebaran data tidak teratur, hal tersebut terlihat pada plot yang menyebar atau terpengar dan tidak membentuk pola tertentu, hal ini dapat disimpulkan tidak ada terjadi kasus heterokedastisitas, maka dapat disimpulkan tidak ada terjadi heterokedastisitas maka penelitian dapat dilanjutkan.

f. Regresi Linear Sederhana dan Uji T

Tabel 7

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 68.461 | 12.271 | | 5.579 | .000 |
| Anggaran Berbasis Kinerja (X) | .469 | .117 | .487 | 4.025 | .000 |

Dari variabel independen yang dimasukkan kedalam model regresi ditemukan hasil perhitungan yang didapat pada tabel 4.13 variabel anggaran berbasis kinerja secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$). Sedangkan nilai t hitung $X = 4,025$ didapatkan dari $df = (n-1-k)$ $df = 54-1-1 = 4,025$, dan t tabel sebesar 2,006 sehingga $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($4,025 > 2,006$). Maka H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

g. Uji Koefisiensi Determinasi

Tabel 8

| Model Summary | | | | |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .987 ^a | .838 | .823 | 6.340 |

Menurut (Ghozali, 2013), Nilai R^2 memiliki nilai interval antar 0 sampai 1 semakin besar R^2 (mendekati 1), maka semakin baik pula hasil untuk model tersebut dan semakin mendekati 0, maka independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen ($0 \leq R^2 \leq 1$). Besar nya nilai adjusted R^2 sebesar 0,823 yang berarti variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 82,3% sedangkan sisanya 17,7 % dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

h. Uji t

Dari variabel independen yang dimasukkan kedalam model regresi ditemukan hasil perhitungan yang didapat pada tabel 4.13 variabel anggaran berbasis kinerja secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan pada nilai lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$). Sedangkan nilai t hitung $X = 4,025$ didapatkan dari $df = (n-1-k) df = 54-1-1 = 4,025$, dan t tabel sebesar 2,006 sehingga t hitung $>$ t tabel ($4,025 > 2,006$). Maka H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan persamaan regresi di atas, anggaran berbasis kinerja (X) koefisien regresi sebesar 0,469 maksudnya adalah jika setiap kenaikan 1 satuan anggaran berbasis kinerja akan menyebabkan meningkatnya kinerja keuangan sebesar 0,469 dengan asumsi variabel independen dianggap konstan. Berdasarkan pada tabel 4.13 di atas variabel anggaran berbasis kinerja mempunyai nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Sedangkan nilai t hitung $X = 4,025$ dan t tabel sebesar 2,006 sehingga t hitung $>$ t tabel ($4,025 > 2,006$). Maka H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada Kantor badan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2017:163) didapatkan hasil bahwa ada pengaruh yang positif penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Keuangan pada Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan V. Anggaran Berbasis Kinerja pada Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan V telah diterapkan dengan sangat baik artinya anggaran berbasis kinerja BPJ Wilayah Pelayanan V telah diterapkan secara efektif dan efisien.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setya (2018:7) didapatkan hasil bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja keuangan, adanya perubahan kinerja keuangan dilakukan oleh struktur anggaran berbasis kinerja. Semakin efektif struktur anggaran berbasis kinerja, semakin tinggi kinerja keuangan yang didapat. Hasil penelitian ini pun sejalan atau sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2019:54), dimana hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pemberlakuan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Pernyataan di atas yang menyatakan bahwa APBD yang mendasari penganggaran pada organisasi sektor public yang disusun dengan pendekatan kinerja tersebut diperkuat oleh pernyataan Mardiasmo (2015:105) yang menyatakan bahwa "*Performance budget* pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengolahan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kerja atau kinerja". Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti berorientasi pada kepentingan publik. Selanjutnya Mardiasmo (2015:132) menyatakan "Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*)".

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan secara teori. Hubungan kedua variabel tersebut, yaitu anggaran berbasis kinerja dan kinerja keuangan dapat diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa instansi menjalankan anggaran berbasis kinerja sebagai alat yang efisien dalam hubungannya dengan kinerja keuangan. Apabila anggaran berbasis kinerja dilaksanakan dengan baik, maka kinerja keuangan

pun akan baik pula. Dengan kata lain ditemukan bukti anggaran berbasis kinerja sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisa data, interpretasi hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan secara parsial menunjukkan hasil 0,000 kurang dari 0,05. Sedangkan nilai t hitung $X = 4,025$ dan t tabel sebesar 2,006 sehingga t hitung $>$ t tabel ($4,025 >$ $2,006$). Maka H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada badan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Apabila anggaran berbasis kinerja dilaksanakan dengan baik, maka kinerja keuangan pun akan baik pula. Dengan kata lain ditemukan bukti anggaran berbasis kinerja sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk penelitian selanjutnya
 - a. Penelitian lebih lanjut terkait dengan variabel yang diteliti, maka agenda penelitian ke depan yaitu perlunya mencoba untuk meneliti variabel-variabel lain yang merupakan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Selain itu, terkait dengan topik penelitian yang serupa, maka diharapkan pada penelitian ke depan dapat menggunakan data sampel dari beberapa jenis organisasi yang berbeda sehingga dapat memberikan hasil yang bervariasi karena adanya perbedaan karakter dari sampel yang diteliti.
 - b. Dapat dilakukan dengan metode lain untuk mendapatkan data yang lengkap, misalnya dengan melakukan wawancara secara langsung dengan responden dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang sebenarnya.
 - c. Penelitian selanjutnya agar lebih memperhatikan waktu penelitian. Waktu penelitian diharapkan tidak dilakukan pada waktu responden sibuk, sehingga tingkat pengembalian kuesioner dapat lebih tinggi, dan mendapatkan hasil yang lebih akurat

2. Bagi Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Diharapkan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai hendaknya lebih meningkatkan lagi penerapan anggaran berbasis kinerja, karena peningkatan penerapan anggaran berbasis kinerja ini dapat digunakan sebagai alat bantu bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mencapai efektivitas pengendalian, juga terus meningkatkan lagi kualitas pelayanan dan anggaran yang direncanakan lebih mengarah pada masyarakat luas agar masyarakat merasa lebih puas dengan pelayanan yang telah diberikan.

Selain itu diharapkan adanya system yang terintegrasi antara perencanaan dan penganggaran sehingga memperkecil kesalahan dalam proses penganggaran. Pelatihan secara berkala bagi pegawai yang menangani perencanaan dan penganggaran juga perlu dilakukan secara berkala untuk memaksimalkan kemampuan pegawai dalam penyusunan anggaran

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2017. *Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 3*. Salemba Empat : Jakarta
- Al Rasyid, Harun. 2014. *Statika Sosial*, disunting oleh Teguh Kusmantoro adji, Pasca Sarjana Unpad. Bandung .
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta
- Claura, Anggie Veronisa. 2015. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SKPD Kabupaten Bengkalis). Volume 2. Nomor 2*
- Dada Rosada. 2013. *LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah). Kota Bandung*. Diakses dari situs. www.bandung.go.id pada bulan Desember 2018.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia/Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). 2018. *Kajian Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia*
- Deputi IV BPKP. 2015. *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)*. Jakarta: BPKP. Diunduh dari <http://www.slideshare.net> pada bulan Desember 2018.
- Haspiarti, 2012. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Pemerintah Kota Parepare)*. Skripsi Dipublikasikan. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Hindri, Asmoko. 2016. *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektifitas Pengendalian Keuangan*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.2 No. 2.
- Indra, Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Erlangga: Jakarta
- Julianto. 2016. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja SKPD di Pemerintah Kota TebingTinggi*. Tesis Dipublikasikan. Medan: Universitas Sumatra Utara
- Junaidi, Gamar Yasmin. 2015. *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektifitas Pengendalian Keuangan Di Pemerintahan Kabupaten Jember*

- Keputusan Ketua LAN Nomor 239 / IX.6 / 8 / 2013, Tentang Perbaikan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Kurniasari, Dewi dkk. 2017. *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektifitas Pengendalian Keuangan. Volume 2, Nomor 2*
- Kurniawan. 2015. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah IV Priangan* . Skripsi Dipublikasikan. Bandung: UPI
- Kurrohman, Taufik. 2013. *Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten/Kota Di Jawa Timur*
- Lestari, Indah Puji. 2015. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Survei Pada Dinas SKPD Pemerintahan Kota Bandung)*
- Mardiasmo. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta
- Maryanto. 2012. *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan pengukuran kinerja*. Diakses dari <http://bppk.depkeu.go.id> pada bulan april 2014
- Nazir, Moch. 2015. *Metode Penelitian* . Ghalia Indonesia: Bogor
- Nina. 2012. *Pengaruh Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pada Pemerintahan Kabupaten Sukabumi*
- Nordiawan, Deddi. 2017. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat: Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2016. No. 13 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Diunduh dari <http://hukum.unsrat.ac.id> pada bulan maret 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2006. No. 59 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Diunduh dari <http://sipkd.jakarta.go.id> pada bulan maret 2014
- Sancoko, Bambang. 2015. *Kajian Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia*. Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Silalahi, Sem Paulus. 2012. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pemerintahan Di Kota Dumai)*. Jurnal Ekonomi Vol. 20 No. 3. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Sri Rahayu, dkk. 2017. “*Studi Fenomenologis Terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris Dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Jambi*” . Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X ASPP-03. Makassar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV, Alfabeta: Bandung

- Triastono, Rohkman. 2010. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Efektifitas Pengendalian Keuangan Di Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember*
- Umar, Husein. 2015. *Metode Penelitian*. Salemba Empat: Jakarta
- Undang-Undang No. 17 Tahun. 2003. *Tentang Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari www.hukumonline.com pada bulan Desember 2018
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah* . Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari www.hukumonline.com pada bulan Desember 2018
- Yohannes Subiyantoro. 2015. *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Kota Mojokerto*